

## **Menelisis Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977: Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto**

*Examining the Historical Portrait of the Implementation of the 1977 Election: Seconds of the Collapse of Suharto's Tyranny of Power*

**Didin Aryanto**

Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang  
Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah  
[didinnaftalia@students.unnes.ac.id](mailto:didinnaftalia@students.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Tulisan ini mendeskripsikan mengenai potret sejarah pelaksanaan pemilu tahun 1977 dan detik-detik runtuhnya tirani kekuasaan Soeharto. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis potret sejarah pelaksanaan pemilu tahun 1977 serta mengungkap detik-detik runtuhnya tirani kekuasaan Soeharto. Pemilihan umum penting untuk sistem berbasis pemungutan suara suatu negara yang menjadi fokus selama waktu yang dihabiskan untuk menyusun administrasi. Keputusan pemilu tahun 1997 penuh dengan misrepresentasi yang ditujukan untuk mempertahankan kekuatan Permintaan Baru. Akhir pemerintahan Presiden Soeharto merupakan akhir dari perkumpulan yang dimotori oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966-1998. Motivasi di balik penjelajahan ini adalah untuk tanpa henti menelaah lebih dalam lagi variabel-variabel yang mendorong berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto dengan menggunakan strategi-strategi yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dari peninjauan tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dipengaruhi oleh peristiwa darurat keuangan yang diperparah dengan adanya infeksi kehinaan, intrik dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh keluarga dan kawan-kawan Presiden Soeharto. Darurat finansial yang mengikutinya membentuk darurat politik, darurat sosial dan darurat budaya keamanan yang menghangatkan dan memperluas minat Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

**Kata kunci:** Sejarah Pemilu Tahun 1977, Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto, Orde Baru

**Abstract.** This paper describes the portrait of the history of the 1977 elections and the moments of the fall of Suharto's tyranny. The purpose of this writing is to find out and analyze the historical portrait of the implementation of the 1977 elections and to reveal the moments of the collapse of the tyranny of Soeharto's rule. Elections are important to a country's voting-based system which is the focus during the time spent setting up the administration. The 1997 election decision was full of misrepresentations aimed at maintaining the power of the New Request. The end of President Soeharto's government was the end of the association led by President Soeharto from 1966-1998. The motivation behind this exploration is to continuously examine more deeply the variables that led to the end of President Soeharto's government by using accountable strategies. The consequences of this review show that the end of President Soeharto's power was influenced by the financial emergency which was exacerbated by the infection of humiliation, intrigue and nepotism (KKN) carried out by President Soeharto's family and friends. The financial emergency that followed formed a political emergency, a social emergency and a security-cultural emergency that warmed and broadened Suharto's interest in stepping down from his post as President.

**Keywords:** History of the 1977 Election, The Fall of the Tyranny of Soeharto's Power, the New Order

## PENDAHULUAN

Pada tahun 1966 pemerintahan Soeharto, atau disebut pemerintahan orde baru bangkit sebagai tanggapan terhadap pemerintahan Soekarno. Menjelang dimulainya pemerintahan orde baru, hampir semua kekuatan yang adil mendukungnya dengan alasan bahwa orde baru seharusnya membuang sistem orde lama. Jenderal Suharto membuat pemerintahan di Indonesia yang dikenal dengan periode Orde Baru untuk mengakuinya dari pemerintahan Sukarno. Permohonan Baru adalah pemerintahan lain yang berlandaskan pada nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. The New Request sebagai pemerintahan baru memperoleh kehancuran moneter, sosial dan politik. Pemerintah Permohonan Baru harus memiliki opsi untuk membuat kemajuan dan langkah yang tepat untuk keluar dari keadaan darurat, karena, jika Permohonan Baru dapat menangani berbagai jenis keadaan darurat dengan baik, pemerintah Permohonan Baru akan lebih membumi dan diakui. secara umum oleh masyarakat. Menurut Presiden Soeharto, untuk memajukan ekonomi yang lebih maju, diperlukan kekuatan keamanan baik secara luas maupun lokal. Keamanan dalam negeri harus dijamin sehingga pendukung keuangan penting yang tidak dikenal tidak kecewa. Presiden Soeharto berbagi kemajuan keuangan dengan para teknokrat (Adam, 2009:46).

Jenderal Soeharto mendirikan administrasi di Indonesia yang dikenal sebagai era Orde Baru, membedakannya dari pemerintahan masa Sukarno. Era Orde Baru adalah suatu bentuk pemerintahan

baru yang dibangun berdasarkan nilai-nilai tinggi Pancasila serta Konstitusi tahun 1945. Sebagai rezim pemerintahan yang baru, Orde Baru mewarisi keruntuhan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Orde Baru adalah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melewati situasi krisis. Keberhasilan dalam menangani beragam tantangan ini akan memperkuat kedudukan pemerintahan Orde Baru dan memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. Menurut Presiden Soeharto, langkah yang esensial dalam memajukan perekonomian adalah menciptakan stabilitas keamanan baik di tingkat nasional maupun regional. Keamanan domestik harus dijamin agar tidak mengganggu masuknya investasi asing yang sangat diperlukan. Presiden Soeharto menyerahkan tanggung jawab pembangunan ekonomi kepada kelompok teknokrat (Adam, 2009:46).

Pada tahun 1966, muncul Orde Baru yang menjadi titik balik serta harapan yang telah dinantikan oleh banyak penduduk Indonesia. Masa pemerintahan sebelumnya yang tidak stabil segera diatasi dengan kehadiran Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Perbaikan dimulai dengan menangani situasi politik, diikuti oleh bidang ekonomi dan beberapa aspek pendukung lainnya. Kekuasaan yang dipegang sepenuhnya oleh Presiden Soeharto berdampak pada berbagai kebijakan pemerintah yang berhasil menciptakan stabilitas nasional. Tindakan tersebut meliputi penyederhanaan partai politik, peningkatan keamanan, kebijakan ekonomi, dan penyelarasan fungsi lembaga negara sesuai dengan pandangan Soeharto.

Peran pemerintah mencuat dengan sangat kuat, sehingga suara dan aspirasi rakyat tampaknya menjadi hal yang kurang dibicarakan pada periode tersebut (Hisyam, 2003:56).

Keyakinan rakyat mengalami penurunan seiring dengan keruntuhan perekonomian yang telah diupayakan oleh pemerintahan Orde Baru selama sekitar 32 tahun. Kenaikan harga barang menjadi nyata, terjadi pemutusan banyak hubungan kerja yang berdampak pada penyusutan peluang pekerjaan, dan munculnya kecurangan, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela di Indonesia. Situasi ini memicu aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia, yang menuntut agar Soeharto melepaskan jabatannya sebagai presiden karena dianggap tak mampu mengatasi berbagai masalah yang melanda Indonesia (Luhulima, 2006:78).

Pemilihan umum yang diharapkan akan menjadi solusi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi hanya dianggap sebagai formalitas belaka oleh masyarakat. Pemilu tahun 1997 merupakan penyelenggaraan keenam dalam era pemerintahan Orde Baru dan yang ketujuh sejak berdirinya Negara Indonesia. Namun, aspek menarik dari Pemilu 1997 adalah bahwa ini merupakan pemilu terakhir di bawah kepemimpinan Soeharto, dan pada saat yang bersamaan, terjadi gelombang protes dan kerusuhan di berbagai daerah. Waktu itu, terdapat upaya protes yang kuat terhadap pemerintahan, karena Orde Baru berada dalam situasi yang sulit karena tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun. Hal ini diperparah oleh ketidakstabilan negara dan pelaksanaan pemilu yang tidak

mencerminkan prinsip demokrasi. Mengingat kondisi ini, tidak mengherankan jika masalah kecil yang biasa muncul, seperti manipulasi hasil perhitungan suara, menjadi isu sensitif yang berpotensi memicu konflik (Syamsudin, 1999).

Kehadiran partai Golkar dalam proses pemilihan umum seakan menjadi instrumen politik yang tak terpisahkan dari rezim Orde Baru, karena partai ini harus meraih kemenangan dengan segala cara demi mempertahankan kekuasaan pemerintah. Kemenangan Partai Golkar menjadi tanggung jawab aparat negara dan para penguasa di tingkat lokal, yang dijamin kelangsungan jabatannya. Selama pemilihan umum, Partai Golkar secara berulang kali mengulang pesan kampanye mengenai pencapaian-pencapaian dalam pembangunan dan berbagai prestasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Soeharto, meskipun sebenarnya hal ini bersifat kosong. Salah satu taktik yang digunakan oleh Golkar untuk meraih kemenangan dalam pemilihan umum adalah dengan merusak citra pesaingnya, dalam hal ini partai PDI menjadi korban dari perpecahan kepemimpinan yang berujung pada penurunan dukungan elektoral (Syamsudin, 1999).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian yang jelas dengan metodologi kualitatif. Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2016: 9) teknik pemeriksaan kualitatif adalah strategi pemeriksaan dalam sudut pandang postpositivisme, digunakan untuk melihat keadaan benda normal dimana peneliti adalah instrumen kuncinya. Kajian

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk melukiskan, memaknai, memaknai, dan menjawab secara lebih mendalam tentang persoalan yang akan dipusatkan dengan memusatkan perhatian secara maksimal pada individu, kelompok atau peristiwa. Investigasi diselesaikan dengan berkonsentrasi pada arsip, misalnya buku, artikel, dan catatan harian yang telah dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977

Persiapan untuk Pemilu tahun 1977 dimulai pada tahun 1975, di mana pemerintah mengajukan peraturan kepada DPR mengenai organisasi partai politik dan prosedur pelaksanaan pemilu. Tujuan utama dari kedua peraturan ini adalah untuk mengurangi kemampuan partai politik dalam bersaing dengan Golkar. Langkah-langkah pembatasan terhadap partai politik meliputi larangan bagi pegawai negeri sipil untuk bergabung dengan partai selain Golkar, serta pembatasan dalam memilih asas ideologi partai hanya pada UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai-partai tersebut sulit dibedakan dari Golkar, terutama PPP. Undang-undang pemilu dirancang dengan tujuan untuk memastikan kemenangan Golkar seperti yang terjadi pada Pemilu 1971 (Liddle, 1992: 40). Pada tahun 1976, PPP menerbitkan sebuah pernyataan politik mengenai prinsip-prinsip dasar dalam bidang politik dan pembangunan yang mencakup hal-hal seperti prinsip negara hukum, peran partai politik, penyelenggaraan pemilu, kesejahteraan

rakyat, kerjasama internasional, aspek politik terkait pertahanan dan keamanan, pola pembangunan, serta peran agama (Saifuddin Zuhri, 1981:70).

Menjelang pemilu 1977, isu mengenai lambang partai dan Golkar mulai timbul. PDI diminta untuk mengubah desain awal lambangnya dengan menambahkan perisai yang merefleksikan salah satu gambar dari Pancasila, hal ini bertujuan untuk memperkuat identifikasi partai dengan gambar banteng yang dahulu menjadi simbol PNI dalam waktu yang lama. Tidak hanya itu, terjadi konflik antara PPP dan Amir Machmud, yang saat itu menjabat sebagai ketua LPU, mengenai penggunaan simbol Ka'bah sebagai lambang PPP. Penolakan oleh Amir Machmud terhadap lambang Ka'bah ini memiliki tujuan untuk meredam pengakuan pemilih terhadap sifat Islamis dari PPP. Namun akhirnya, dalam pertikaian ini, PPP berhasil meraih kemenangan, dan pihak LPU menyetujui penggunaan simbol Ka'bah tersebut (Liddle, 1992: 41).

Pemilu 1997 telah diantisipasi oleh sebagian kalangan tidak akan mencapai tingkat demokrasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini dikarenakan kondisi negara yang tidak stabil sebelum pelaksanaan pemilu telah menyebabkan munculnya berbagai konflik rasial di berbagai daerah, dampak dari krisis yang melanda negara. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kembali situasinya, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menekan aspirasi yang timbul dari masyarakat akibat keadaan negara yang kacau. Di samping itu, selama proses kampanye, terlihat bahwa Golkar, dengan jumlah massa yang besar,

mendapatkan berbagai kemudahan dalam menerapkan strategi kampanye mereka. Sebaliknya, perlakuan pemerintah terhadap partai PPP dan PDI sangat berbeda, dimana kedua partai ini menghadapi berbagai tekanan dalam menjalankan strategi kampanye mereka (Azwar, 2008).

Dalam hal penegakan hukum pada pemilu 1971, dapat dengan jelas dilihat bahwa para peserta pemilu sangat memperhatikan upaya memberikan bantuan hukum kepada anggota atau pendukung mereka yang dihadapkan pada proses pengadilan. Pada masa itu, pimpinan partai politik membentuk beberapa tim yang dikirim ke berbagai wilayah untuk memberikan dukungan hukum kepada anggota mereka yang harus menghadapi proses hukum. Namun, pada pemilu 1977, konsistensi dalam penegakan hukum oleh sistem peradilan tidak begitu mencolok. Pada pemilu 1971, secara khusus diatur pelaksanaan "Peradilan Kilat" guna menangani kasus-kasus yang terkait dengan pemilu. Namun, pada pemilu 1977, penggantinya hanya menyarankan prioritas dalam menangani kasus-kasus yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilu (Sinar Harapan, 4 Mei 1977).

Permilu kemudian diadakan untuk memilih delegasi yang mungkin duduk di DPR RI, DPRD biasa, dan DPRD Kota/Peraturan. Anggota dalam pemilu politik ini adalah Golkar, PPP, dan PDI. Hadirnya pertarungan antar individu yang semakin solid mendorong PPP dan PDI untuk lebih berani mengkomunikasikan pandangannya untuk mencermati otoritas publik yang sedang berkuasa. Titik berat pertimbangan dalam perbedaan pendapat ini adalah merebaknya praktik kehinaan,

pengaturan dan nepotisme (KKN) di dalam otoritas publik, serta tugas besar militer di parlemen melalui ABRI. Padahal otoritas publik telah berusaha untuk mengalahkan perbedaan pendapat ini dengan memberikan Peraturan No. 5 Tahun 1995 yang berencana mengurangi jumlah kursi ABRI di DPR, langkah ini lalai meredam gejolak pertikaian yang merebak di seluruh lapisan masyarakat. Padahal, otoritas publik masih dinamis dalam melakukan berbagai upaya membantu Partai Golkar dalam proses pengambilan keputusan politik. Kegiatan ini mungkin didasari pemikiran bahwa dalam keputusan politik 1992, Partai Golkar dan PDI memiliki perbedaan yang tidak terlalu besar dalam kerangka berpikir pemilih tersebut. Dengan demikian, kehadiran PDI dipandang membahayakan situasi Golkar sebagai perangkat politik penguasa publik saat itu (Thoha, 2014).

Keputusan pemilu 1977 pada hakekatnya mempengaruhi unsur-unsur politik di Indonesia. Golkar muncul sebagai kekuatan politik yang berhasil menjaga keterandalan situasinya. Sementara itu, PPP juga telah muncul sebagai kekuatan publik potensial, namun dihadapkan pada tantangan dari wilayah yang agak baru dan berkembang di beberapa daerah. Kehadiran PDI dalam keputusan politik tidak mendapat dukungan secara merata di seluruh Indonesia. PDI selain disebut sebagai partai yang memiliki kekuatan daerah di Jawa, juga mendapat dukungan dari daerah pendatang dan daerah yang memiliki keturunan Jawa, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pada Pemilihan Umum tahun 1977, Golkar berhasil memperlihatkan dengan jelas, baik

dari segi jumlah maupun proporsi, bahwa mereka memiliki hak-hak politik dan konstitusional. Sementara itu, kelompok politik di luar Golkar tetap memiliki peluang untuk meningkatkan aktivitas mereka dalam upaya membangun politik negara. Karena itu, tidak ada alasan lagi untuk menekan golongan non-Golkar dalam usaha mewujudkan penghayatan Demokrasi Pancasila, (seperti yang diungkapkan oleh Suara Merdeka pada tanggal 5 Mei 1977).

Konsekuensi dari keputusan politik tersebut membawa Golkar sebagai juara utama dengan meraih 74,51 persen suara, disusul PPP dengan 22,43 persen suara, dan PDI di urutan terakhir dengan hanya 3,06 persen suara. Dalam pilkada yang digantung pada 29 Mei 1997, Golkar berhasil meraih kemenangan telak, namun prestasi itu diikuti oleh gejolak dan keributan yang meluas di berbagai kabupaten. Pasalnya, banyak pihak yang mempertanyakan keaslian kemenangan Golkar kali ini karena diragukan adanya pemerasan. Konsekuensi dari keputusan politik 1997 secara fundamental mempengaruhi PDI secara positif, karena pada keputusan politik sebelumnya, khususnya pada tahun 1992, hanya PDI yang memiliki pilihan untuk menjadi tolok ukur kekuatan Golkar dengan berbagai metodologi yang mereka gunakan (Friyanti, 2005).

### **Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto**

Orde Baru adalah sistem administrasi yang aktif dari tahun 1966 hingga 1998. Selama periode ini, upaya dilakukan untuk membangun kembali struktur administrasi

yang berfokus pada Presiden, Wakil Presiden dan biro, dengan mengembalikan kerangka cabang presidensial. Selain menghidupkan kembali kepala daerah, Pemerintahan Permintaan Baru juga mendorong pelaksanaan UUD 1945 yang lebih membumi, dengan mengembalikan kekuasaan kepada lembaga tertinggi, MPR, dan membatasi kekuasaan Presiden. Sistem Permohonan Baru juga terkenal dengan upayanya untuk menjadikan Pancasila sebagai pembantu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui program penataan ulang Aturan Memahami dan Menghayati Pancasila untuk masyarakat Indonesia. Dalam memperkuat norma-norma ekspres digunakan beberapa landasan hukum, seperti Deklarasi MPR No. 1/MPR/1983 yang menegaskan kewajiban MPR untuk melindungi UUD 1945 dan tidak mengubahnya tanpa persetujuan individu. Juga, Deklarasi MPR No. IV/MPR/1983 tentang Amanat menyatakan bahwa perubahan UUD 1945 harus dilakukan setelah mendapatkan pengesahan perseorangan melalui suatu mandat (Zona Nesia, 2016).

Kerangka waktu orde baru menunjukkan janji untuk memperkuat norma-norma UUD 1945 dan falsafah masyarakat Pancasila, atau disebut Periode sistem aturan mayoritas Pancasila. Pada awalnya, pemerintah Permintaan Baru memperbaiki kerangka kelompok ideologis, menyisakan hanya tiga partai utama yang tersisa: Golkar dari sisi partai dan ABRI dari sisi taktis, yang berubah menjadi kekuatan politik yang dominan (Sukoco, 2012). Periode ini menunjukkan pengaruh pemimpin yang secara lugas mengawasi kerangka partai, yang menjadi

alasan untuk memperkuat struktur otoritas publik dengan mencari keharmonisan antara pimpinan dan cabang pemerintahan. Misalnya, kiprah Golkar pada masa Permohonan Baru mencerminkan hal itu. Golkar bekerja sebagai kepanjangan tangan militer di dalam organisasi-organisasi warga biasa, melemahkan posisi kelompok-kelompok ideologis lainnya. Selanjutnya, Golkar didukung oleh komponen militer dalam mempersiapkan asosiasi utilitarian daerah untuk membantunya, sehingga kelompok perlawanan semakin diremehkan (Sukoco, 2012). Dengan demikian, Presiden Soeharto yang memiliki landasan taktis menjadikan komponen taktis sebagai premis politik yang memungkinkannya terlibat dengan persoalan legislatif yang tumbuh di dalam negeri, yang menjadikan lingkungan lain dalam kerangka politik Indonesia.

Keadaan darurat kepercayaan adalah apa yang terjadi yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan atau hilangnya kepercayaan total, biasanya dipicu oleh kekecewaan atau suasana hati yang buruk. Mendesaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru diawali dengan maraknya latihan KKN di pemerintahan, yang diperparah dengan jebolnya kerangka administrasi. Keadaan sekarang ini semakin memburuk dengan rusaknya sistem aturan mayoritas, di mana ras yang seharusnya menjadi metode artikulasi masyarakat telah sepenuhnya diatur dan dibatasi oleh otoritas publik yang berkuasa (Dwianto, 2011).

Sistem Orde Baru adalah pemerintahan terpanjang di Indonesia, dengan masa berlaku sampai 32 tahun.

Organisasi ini berpusat pada pergantian peristiwa dan pengurus aset normal Indonesia melalui Program Kemajuan Jangka Panjang (PELITA). Namun, sifat miring jangka panjang dan kerawanan dalam sistem politik menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi jangka panjang, terutama menjelang pergantian seribu tahun. Kekecewaan ketiga partai besar tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan pemerintah disebabkan oleh perpecahan perbedaan struktur politik yang dilakukan oleh ujung tombak politik. Kualitas kerangka politik seperti itu menyebabkan strategi dan bantalan pendekatan pemerintah tidak mencerminkan atau menjunjung tinggi kehendak asli individu (Sukoco, 2012). Upaya hambatan politik menghadapi reaksi keras dari otoritas publik yang terkekang oleh komponen militer, sehingga menghambat perkembangan tujuan politik individu sebagai sumber kekuatan negara. Kondisi saat ini diperparah dengan jatuhnya perekonomian Indonesia yang tidak dapat diantisipasi oleh otoritas publik seperti yang diharapkan. Akhirnya, perkembangan massa tidak dapat dihentikan, sehingga menimbulkan benturan antara otoritas publik dan individu yang mendorong terjadinya aksi massa di berbagai daerah, khususnya di Jakarta sebagai ibu kota. Kegiatan pameran ini membahas kemauan politik daerah yang lebih luas untuk melakukan perubahan total, khususnya di bagian administrasi. Desakan hasrat politik ini akhirnya menyudahi inisiatif Suharto (Sukoco, 2012).

Mendekati akhir pemerintahannya, Presiden Soeharto mulai ditinggalkan oleh orang-orang dari bironya. Pada 20 Mei,

Harmoko dan oknum Golkar yang sebelumnya setia kepada Soeharto mendesak Presiden untuk menganggap dirinya bertanggung jawab atas kegiatannya melalui rapat khusus MPR. Tekanan meningkat ketika para ulama atas prakarsa Akbar Tanjung dan Ginandjar Kartasasmita mengadakan rapat dan menyusun proklamasi bahwa mereka lebih baik tidak melanjutkan kewajiban mereka di biro baru, sambil mendorong Presiden keluar (Notosusanto, 2009:672). Soeharto meminta Pendeta Sekretaris Negara Saadillah Mursjid mengatur cara paling umum untuk keluar dari jabatan Presiden sesuai konstitusi. Suharto juga memerintahkan agar pengunduran dirinya dilakukan di Istana Merdeka. Orang-orang bersorak ketika mendengar kabar bahwa Soeharto siap meninggalkan posisinya. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan surat persetujuannya, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan dan pengambilan janji BJ. Habibie sebagai Pemimpin Republik Indonesia dalam pandangan otoritas negara. Setelah Soeharto selesai membaca surat persetujuannya, sumpah berfungsi untuk pengaturan BJ. Habibie sebagai Pemimpin Republik Indonesia dilakukan secara lugas.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pengaturan untuk pemilihan tahun 1977 dimulai pada tahun 1975 dan melibatkan pedoman dan tindakan yang berbeda untuk mengurangi kapasitas kelompok ideologis untuk menyaingi Golkar. Hal ini mengingat adanya larangan bagi pegawai negeri untuk bergabung dengan partai selain Golkar dan batasan sistem kepercayaan partai. Adanya perebutan dan persaingan terkait citra dan

citra kelompok ideologis, seperti penyesuaian citra PDI dan pemanfaatan citra Ka'bah oleh PPP. Keputusan politik tahun 1997 diperkirakan akan bergerak dan bentrok lebih besar karena kondisi negara yang goyah dan darurat keuangan. Golkar diuntungkan dengan akomodasi dalam teknik misinya, sementara partai PPP dan PDI menghadapi tekanan. Pada pacuan politik 1971 terdapat konsistensi dalam menjaga kerangka pemerataan, sedangkan pada pacuan politik 1977 hal ini tidak terlalu menonjol. Perlombaan politik 1997 meliputi partai Golkar, PPP, dan PDI. Kesulitan dan kontras penilaian sehubungan dengan kekuasaan publik, strategi militer, dan praktik korupsi menjadi titik fokus diskusi. Hasil keputusan politik tahun 1977 menunjukkan Golkar sebagai juara fundamental, disusul oleh PPP dan PDI. Bagaimanapun, ada pertanyaan sehubungan dengan kredibilitas kemenangan Golkar dalam pertarungan politik ini. Pilihan politik 1997 jelas mempengaruhi PDI, dan PDI menjadi tolak ukur solidaritas Golkar dalam beberapa pilihan politik masa lalu. Berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto diperkirakan akan menimbulkan keadaan darurat moneter, politik, sosial-sosial, dan keamanan yang tidak dapat dipungkiri di Indonesia. Darurat keuangan menyebabkan devaluasi rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan peningkatan biaya kebutuhan sehari-hari dan banyak pemotongan di berbagai organisasi. Keadaan saat ini membuat masyarakat menjadi lebih kuat dan cenderung mengamuk, sehingga meningkatkan persentase kejahatan. Kekecewaan publik juga diperparah dengan tindakan tidak



pantas pejabat publik yang membuat pertikaian dan demonstrasi pengganti menuntut turunnya Presiden Soeharto. Menghadapi apa yang terjadi di Indonesia, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan hengkang pada 21 Mei 1998, dan posisinya digantikan oleh B.J. Habibie. Adapun saran yang penulis dapat berikan adalah lebih memperdalam serta memperkaya bacaan-bacaan mengenai sejarah pelaksanaan pemilu tahun 1977 serta sejarah berakhirnya masa pemerintahan Soeharto supaya memiliki pemahaman dan sudut pandang yang luas terkait peristiwa sejarah tersebut.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdoel Madjid. 1977 Maret 7. "Pidato Kampanye PDI" *Suara Merdeka*. 1.
- Adam, A. W. (2009). *Membongkar manipulasi Sejarah*. Jakarta: Kompas.
- Azwar, R.C. (2008). *Partai Golkar di tiga era*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia.
- Dwianto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Friyanti, F. (2005). Pelaksanaan pemilihan umum dalam sejarah nasional Indonesia. *Skripsi tidak diterbitkan*. FIS Universitas Negeri Semarang.
- Hisyam, M. (2003). *Krisis masa kini dan orde baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ischak Suryodiputro. 1977. April. 23 "Larangan Selama Minggu Tenang" *Sinar Harapan*. 1.
- Liddle, R. W. (1992). *Partisipasi & partai politik: Indonesia pada awal Orde Baru*. Pustaka Utama Grafiti.
- Luhulima. (2006). *Hari-Hari Terpanjang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait*. Jakarta.
- Poesponegoro, M. D. & Notosusanto. N. (2009). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sukoco, M. (2012). Kajian Sistem Pemerintahan dan Politik, April, (Online) diakses dari: [https://www.researchgate.net/publication/288670683\\_Kajian\\_Sistem\\_Politik\\_dan\\_Pemerintahan\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/288670683_Kajian_Sistem_Politik_dan_Pemerintahan_di_Indonesia) (05 Agustus 2023).
- Sugiyono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsudin, H. (1999). *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zona Nesia. (2016). *Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia*, 19 Februari, (Online) diakses dari <http://www.zonanesia.net/2014/10/periodisasi-sistem-pemerintahan.html> (05 Agustus 2023).
- Zuhri, S. (1981). *Kaleidoskop politik di Indonesia*. (No Title).